
DUALISME PENDIDIKAN DI INDONESIA

Abdul Wahab

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Pontianak
Kampus: Jl. Letjen Suprpto No. 19 Pontianak
Email: abdulwahabassambassi@gmail.com

Abstrak:

Dalam konteks pendidikan istilah dualisme dan dikotomi memiliki makna yang sama yaitu pemisahan antara pendidikan umum dari pendidikan agama. Dikotomi selalu melahirkan pandangan pembedaan di satu sisi dan penyamaan di sisi yang lain. Pandangan dikotomis pada hakikatnya mengabaikan esensi atau nilai spirit pendidikan. Membedakan dan menyamakan lebih dimaknai pada tataran permukaan sehingga jelas merusak nilai spirit dari pendidikan Islam. Dualisme dan dikotomi bukan hanya pada tataran pemilahan, tetapi telah masuk pada wilayah pemisahan yang dalam operasionalnya memisahkan mata pelajaran umum dari mata pelajaran agama, sekolah umum dan madrasah yang pengelolaannya berjalan terpisah-pisah. Puncaknya pada pemerintah Orde Baru yang mengeluarkan melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) pada tanggal 24 Maret 1975 yang menguatkan pemisahan itu hingga saat ini. Dampaknya terasa merugikan dan makna Islam menjadi sempit karena pengotak-kotakan ilmu akhirnya memordukan dan menganaktirikan pendidikan Islam. Sebagai solusi alternatif harus diikuti upaya integrasi pengetahuan serta reposisi, yaitu cara pandang yang ilmu-ilmu Islam pada posisi yang sebenarnya.

Abstract:

In the educational context, the term dualism and dichotomy have the same meaning, namely the separation between general education and religious education. The terms also mean the separation between education system of Islamic and general educations. Moreover, talking about Islamic education is often addressed to Islamic institutions. Such perspectives are triggered by dichotomous view on education, differentiate in one side and equate on the other side. Consequently, the spirit value that is integrated into Islamic education is neglected. The terms, currently, have pervaded on the separation of general and Islamic subjects, public and madrasah Institutions, where the management has a policy respectively. The impacts are narrow minded in interpreting Islamic meaning, compartmentalization in science, and inequality of budgeting between Islamic and general education institutions. The offered alternative solutions are Islamization of knowledge, integration of science, and reposition of Islamic view, that means returning to the spirit value of Islamic education.

Kata kunci:

Dualisme Pendidikan, Pendidikan Islam

SULIT untuk dibantah bahwa tema yang menonjol dalam dunia pendidikan di Indonesia akhir-akhir ini adalah adanya dualisme pendidikan yang memperlihatkan pendidikan yang terkotak-kotak. Diakui atau tidak, dampak sosial dualisme pendidikan dapat menjadikan tingkat pengetahuan masyarakat terbelah-belah dan tidak utuh yang pada gilirannya terjadi penilaian yang berbeda terhadap pendidikan yang ideal sesuai dengan latar belakang pendidikan yang mereka tempuh.

Jika dualisme dalam pendidikan tersebut dibiarkan berlangsung terus-menerus, akan melestarikan keterbelakangan dunia pendidikan, khususnya pendidikan Islam. Padahal, menurut catatan sejarah, kemajuan teknologi di barat sesungguhnya digali dari pengetahuan yang dibangun oleh orang-orang Islam yang hidup di mana tidak memisahkan antara ilmu agama dan ilmu umum.¹

Fenomena dualisme pendidikan dapat ditelusuri sejak masa penjajahan. Dualisme lembaga pendidikan di Indonesia sekarang ini dapat dikelompokkan ke dalam sekolah umum dan sekolah agama. Sekolah agama menciptakan sarjana agama yang pintar dalam ilmu syariah, tetapi tidak tahu menahu ilmu umum. Begitu pula sebaliknya, seorang profesor kimia, kompeten di bidangnya, tetapi awam untuk urusan agama.

Menurut Abdul Rahman Al Segaf bahwa dari sudut pandang Islam, secara konseptual tidak dijumpai adanya dualisme ilmu. Jika kita menoleh terhadap pegangan Islam yakni al-Qur'an atau hadis, tidak ditemukan, baik secara tersirat maupun tersurat tentang dalil mengenai dualisme dalam pendidikan. Islam mengajarkan untuk menuntut semua cabang ilmu.² Hal ini sejalan dengan al-Qur'an dan hadis yang tidak mengenal dualisme pendidikan dalam Islam.

Oleh karena itu, tulisan ini membahas dualisme pendidikan dan penyebab lahirnya. Demikian pula implikasi dari dualisme pendidikan di Indonesia dan bagaimana solusi yang untuk menyikapinya sehingga isu dalam pendidikan Indonesia ini dapat terselesaikan dengan baik.

PEMBAHASAN

Pengertian Dualisme Pendidikan

Perkataan "dualisme" adalah gabungan dua perkataan yang berasal dari bahasa Latin yaitu "dualis" atau "duo" dan "ismus" atau "isme". "Duo" memberi arti kata dua sedangkan "ismus" berfungsi membentuk kata nama bagi satu kata kerja. Dualisme adalah dua prinsip yang saling bertentangan. Secara terminologi, dualisme dapat diartikan sebagai dua prinsip atau paham yang berbeda dan saling bertentangan. Oleh karena itu, dualisme ialah keadaan yang menjadi dua dan ia adalah satu sistem atau teori yang berdasarkan pada dua prinsip yang menyatakan bahwa ada dua substansi.³

Dalam konteks pendidikan, Marwan Sarijo⁴ menyatakan bahwa istilah dualisme dan dikotomi memiliki makna yang sama yaitu pemisahan antara pendidikan umum dari pendidikan agama. Dengan pemaknaan di atas, dualisme dan dikotomi pendidikan adalah pemisahan sistem pendidikan antara pendidikan Islam dan pendidikan umum yang memisahkan kesadaran keagamaan dan ilmu pengetahuan atau ilmu umum. Dualisme dan dikotomi ini, bukan hanya pada tataran pemilahan tetapi masuk pada wilayah pemisahan. Dalam operasionalnya, pemisahan mata pelajaran umum dengan mata pelajaran agama, sekolah umum dan madrasah yang pengelolaannya memiliki kebijakan masing-masing.

Di Indonesia, bidang pendidikan ditangani oleh dua kementerian yakni Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama. Dalam pelaksanaannya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membawahi lembaga pendidikan mulai TK, SD, SMP, SMA, hingga Perguruan Tinggi Umum. Sedangkan Kementerian Agama mengurus lembaga pendidikan dari RA MI, MTs, MA, hingga Perguruan Tinggi Agama Islam (UIN, IAIN, STAIN dan PTAIS). Hal tersebut memunculkan pemahaman adanya dualisme pendidikan, yakni adanya sekolah umum dan sekolah agama. Kedua lembaga penyelenggara pendidikan tersebut merupakan bagian sistem pendidikan nasional.⁵

Sejarah Dualisme Pendidikan Islam

Bentuk dualisme dalam pendidikan itu dapat dilihat dari kebijakan pemerintah, baik dari kebijakan dalam undang-undang pendidikan nasional maupun Peraturan Pemerintah. Pergumulan antara sistem pendidikan umum dengan sistem pendidikan Islam pun terus berlangsung.

Pada tahun 1974, pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1972 tentang kewenangan penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, termasuk di dalamnya penyelenggaraan pendidikan agama.⁶ Keputusan itu diikuti oleh Inpres No. 15 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden tersebut. Keputusan ini mendapat tantangan keras dari kalangan Islam. Alasannya karena madrasah harus dikelola oleh Kemendikbud sebagai satu-satunya kementerian yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan nasional.⁷ Bahkan sebagian umat Islam memandang Kepres dan Inpres tersebut sebagai manuver untuk mengabaikan peranan dan manfaat madrasah juga dipandang sebagai langkah untuk mengurangi tugas dan peranan Kementerian Agama dan bagian dari upaya sekulerisasi yang dilakukan pemerintah Orde Baru. Hal ini cukup beralasan dikaitkan dengan setting sosial politik yang berlangsung pada awal pemerintah Orde Baru yang menerapkan kebijakan politik yang memarjinalkan politik Islam melalui pengebirian partai politik Islam.⁸

Munculnya reaksi keras dari umat Islam ini disadari oleh pemerintah Orde Baru. Pemerintah kemudian mengambil kebijakan yang lebih operasional dengan mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) pada tanggal 24 Maret 1975, yang ditandatangani oleh Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama yaitu No. 6 Tahun 1975; No. 037/U/1975; dan No. 36 Tahun 1975. Inti dari ketetapan dari SKB Tiga Menteri ini adalah:

1. Agar madrasah untuk semua jenjang dapat mempunyai nilai yang sama dengan ijazah sekolah umum yang setingkat.
2. Agar lulusan madrasah dapat melanjutkan ke sekolah umum setingkat dan lebih atas.
3. Agar siswa madrasah dapat berpindah ke sekolah umum yang setingkat, maka kurikulum yang diselenggarakan madrasah harus terdiri dari 70% mata pelajaran umum dan 30% mata pelajaran agama.⁹

Pada kenyataannya, dualisme pendidikan di Indonesia sampai sekarang masih melingkupi pendidikan nasional. Kementerian Agama sebagai pemegang otoritas pengelolaan pendidikan agama berhadapan dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selaku pengelola pendidikan umum sehingga muncul persoalan-persoalan, yakni dualisme dalam pendidikan di Indonesia.

Adanya dualisme dalam pendidikan yakni pendidikan umum dan pendidikan agama sampai sekarang masih tampak dalam UU RI No.20 tahun 2003 Bab VI, pasal 15 tentang Sisdiknas yang berbunyi: "Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, advokasi dan keagamaan". Dari pasal tersebut tampak jelas terjadinya dualisme dalam pendidikan agama dan pendidikan umum.

Pandangan Islam Mengenai Dualisme Pendidikan

Ulama-ulama terdulu tidak pernah membedakan ilmu umum dan ilmu agama. Namun, menurut Muhamad Abduh, harus ada skala prioritas dimana ilmu agama perlu diajarkan pertama kali karena berkaitan dengan kebutuhan dasar sebagai orang beragama. Dia harus tahu hakikat agamanya supaya punya identitas, sistem moral yang kuat, dan visi yang jelas.¹⁰

Bukti bahwa ulama dulu tak pernah membedakan disiplin ilmu tertentu dapat dilihat dari otoritas keilmuan yang dikuasai ulama-ulama terdahulu. Ini mengindikasikan Islam sangatlah menjunjung tinggi keutamaan ilmu dari aspek keutuhan ilmu. Para tokoh muslim dan ulama terdahulu juga telah membuktikan kesatuan ilmu yang wajib dipelajari. Al-Kindi merupakan seorang filsuf sekaligus agamawan, begitu pula al-Farabi. Ibn Sina, selain ahli dalam bidang kedokteran, filsafat, psikologi, dan musik, beliau juga seorang ulama. Al-Khawarizmi adalah ulama yang ahli matematika, al-Ghazali, walaupun belakangan populer karena kehidupan dan ajaran sufistiknya, sebenarnya beliau telah melalui berbagai bidang ilmu yang diketahuinya, mulai dari ilmu fiqh, kalam, falsafah, hingga tasawuf. Ibn Rusyd, seorang ahli fikih yang mampu menghasilkan karya besarnya *Bidayat Al-Mujtahid*, mampu mengsinergikan filsafat dan ilmu fiqh. Ibn Khaldun dikenal sebagai ulama peletak dasar sosiologi modern dalam karya besarnya *Al-Mukaddimah*, yang sampai sekarang banyak ahli yang mengkajinya, baik dari kalangan umat Islam maupun para orientalis.

Jadi, dapat dikatakan bahwa ternyata ilmu orang dulu hampir tidak mengenal istilah dualisme ilmu karena bagi mereka semua aliran ilmu itu berada dalam satu atap bangunan pemikiran dan bersumber dari Allah, Dzat yang Maha Esa. Tidak ada ilmu yang berdiri sendiri. Semua saling terkait dan saling melengkapi.

Keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat menunjukkan betapa penting antara keduanya dan saling berkaitan satu sama lain. Dalam disiplin ilmu pun tidak harus dibedakan ilmu duniawi dan yang lain ukhrawi seperti isyarat dalam QS al-Mujadilah/58: 11 berikut yang mengarahkan keseimbangan dalam pendidikan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ فَأَنْشُرُوا فَأَنْشُرُوا
يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (١١)

(11) Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antarmu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan".

Dualisme dalam pendidikan adalah konsep yang sama sekali tidak dikenal dalam tradisi keilmuan salaf. Banyaknya ulama yang punya otoritas keilmuan lebih dari satu bidang adalah bukti kuat ulama kita tidak mengenal konsep dikotomi ilmu.¹¹ Rasulullah saw. sekalipun sebagai suri tauladan yang baik (*uswatun hasanah*), tidak pernah membedakan antara ilmu umum dan ilmu agama karena semua ilmu datangnya dari satu Dzat, yaitu Allah swt. Apa yang diistilahkan orang-orang sekarang sebagai ilmu agama (ilmu-ilmu Islam- teologi, tafsir, hadis, fikih, dll) dan ilmu-ilmu umum (ilmu sekuler), dalam pandangan Islam, pada batas tertentu, wajib dikuasai semuanya. Artinya, bagi setiap muslim wajib mempelajarinya. Artinya, terminologi dalam ranah keilmuan Islam sangat luas cakupannya menyangkut hal yang bisa diverifikasi dan hal-hal yang bersifat metafisik. Maka menerjemahkan kalimat 'ilmu dalam bahasa Arab dengan *science* (Inggris) menurut penulis tidak tepat karena istilah *science* sangat positivistik hanya mendasarkan kebenaran pada realitas empiris belaka.

Secara konseptual, menurut Abdul Rahman Al Segaf,¹² dalam pendidikan Islam tidak dijumpai dualisme. Jika kita menoleh pegangan Islam yakni al-Qur'an ataupun hadis tidak ditemukan, baik secara tersirat terlebih lagi tersurat menemukan dalil mengenai dualisme ilmu atau pendidikan. Justru sebaliknya Islam mengajarkan untuk menuntut semua cabang ilmu.

Akar masalah dualisme pendidikan di Indonesia adalah persoalan pemisahan antara ilmu umum dan ilmu agama. Menurut Dr. Mochtar Naim, dualisme pendidikan adalah penyebab utama dari kesenjangan pendidikan di Indonesia dengan segala akibat yang ditimbulkannya. Hal ini merupakan warisan dari kolonial Belanda.

Dampak Akibat dari Dualisme Pendidikan di Indonesia

Munculnya dualisme pendidikan di Indonesia mempunyai dampak *image* yang negatif tentang:

1. Anti agama telah dipersempit yaitu sejauh yang berkaitan dengan aspek teologi Islam yang diajarkan di sekolah-sekolah agama selama ini;
2. Sekolah agama telah terkotak dalam kubu tersendiri;
3. Sumber masukan sekolah agama dan Perguruan Tinggi Agama Islam umumnya berkemampuan rendah, maka mutu tamatannya adalah tergolong kelas dua;
4. Kegiatan keagamaan dan api keislaman di IAIN dan perguruan agama Islam kurang menonjol dan kurang dirasakan dibandingkan dengan perguruan tinggi umum.¹³

Dampak lain dari dualisme pendidikan adalah bahwa meskipun madrasah yang dikelola oleh Kementerian Agama secara institusi telah diakui oleh UUSPN No. 2 Tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, namun perwujudan makna pengakuan tersebut masih belum sesuai dengan jiwa undang-undang tersebut. Hal ini dapat dilihat dari alokasi ang-

garan untuk pembinaan dan pengembangan mutu madrasah belum sebanding dengan anggaran yang diberikan kepada sekolah-sekolah yang berada dalam naungan Kemendikbud.¹⁴ Dengan perhatian pemerintah yang tidak seimbang antara kedua lembaga pendidikan tersebut, maka sangat logis bila kemudian mutu pendidikan Islam, khususnya madrasah berada di bawah pendidikan umum.

Dualisme dalam pendidikan di Indonesia diakomodir oleh undang-undang pendidikan sebagaimana tercantum dalam UU RI tentang Sisdiknas No. 20 tahun 2003 Bab VI, pasal 15 yang berbunyi: "Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, advokasi, keagamaan". Dari pasal tersebut tampak jelas terjadinya dualisme dalam pendidikan agama dan pendidikan umum. Di tingkat kelembagaan terjadi pemisahan antara perguruan tinggi agama seperti UIN Syarif Hidayatullah dan perguruan tinggi umum seperti ITB, UI dan lain-lain.

Hal inilah yang menjadikan pendidikan Islam melalui madrasah, institut agama, dan pesantren dikelola oleh Kementerian Agama, sedangkan pendidikan umum melalui sekolah dasar, sekolah menengah, dan kejuruan serta perguruan tinggi umum dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Padahal, pendidikan Islam tidak semata-mata mengajarkan pengetahuan Islam, tetapi juga menekankan pada pembentukan sikap dan perilaku yaitu membentuk manusia *islamis*.

Solusi dalam menangani Dualisme pendidikan di Indonesia

Menurut Ramayulis, solusi untuk mengurangi atau meniadakan dualisme dalam pendidikan dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip keseimbangan yang mendasari pendidikan Islam yaitu keseimbangan antara kehidupan duniawi dan ukhrawi, keseimbangan antara jasmani dan rohani, serta keseimbangan antara individu dan masyarakat.¹⁵

Al-Faruqi menawarkan islamisasi ilmu ke dalam pendidikan Islam dengan melebur dua sistem pendidikan; tradisional dan modern, menjadi sistem pendidikan yang berwawasan Islam. Ini dimaksudkan untuk menghilangkan problem dualisme dalam sistem pendidikan. Ide tersebut berisikan suatu prinsip bahwa keilmuan barat tidak harus ditolak, artinya perlu diterima, tetapi harus melalui proses filterisasi yang disejalankan dengan nafas Islami agar tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan hadis.¹⁶

Untuk memecahkan masalah dualisme pendidikan, merupakan al-Faruqi memecahkan problem dualisme pendidikan adalah islamisasi ilmu dalam pendidikan Islam. Menurut al-Faruqi, jalannya adalah melakukan islamisasi ilmu. Menurutnya, para akademisi Islam hendaknya memberi solusi melalui islamisasi ilmu.¹⁷ Artinya, akademisi muslim harus menguasai semua disiplin ilmu modern, memahami disiplin tersebut dengan sempurna, dan merasakan itu sebagai perintah agama. Setelah itu, mereka harus mengintegrasikan pengetahuan baru tersebut ke dalam keutuhan warisan Islam dengan melakukan eliminasi, perubahan, penafsiran kembali, dan penyesuaian terhadap komponen-komponennya sebagai *world view* Islam dan menetapkan nilai-nilainya.¹⁸

Selanjutnya, mendorong pemerintah untuk mengintegrasikan pendidikan umum dan pendidikan agama ke dalam satu sistem. Sebagai bagian dari proses pencarian rumusan sistem pendidikan nasional yang tunggal, pergumulan itu secara bertahap harus menghasilkan penyesuaian-penyesuaian yang signifikan. Tentu butuh proses yang panjang dan mungkin terjadi ketegangan politik di antara komponen yang berbeda pandangan.

Gagasan tentang pendidikan nasional di bawah satu atap berarti penghilangan "dualisme" penyelenggaraan pendidikan di Indonesia seperti yang dijalankan selama ini, sebenarnya bukan suatu hal baru. Pada masa Orde Baru, Mendikbud pernah mengemukakan gagasan ini yang berarti bahwa semua lembaga pendidikan, termasuk lembaga pendidikan keagamaan, diurus di departemennya. Pada saat itu, gagasan ini mendapat reaksi keras dari kalangan pemimpin dan organisasi Islam, terutama karena pertimbangan politis, yakni kekhawatiran akan adanya proses sekularisasi dalam bidang pendidikan di Indonesia. Di samping itu, umat Islam yang pada waktu itu termarginalisasi secara politis, berpikir bahwa keberadaan pendidikan keagamaan bukan hanya sekadar bentuk kelembagaan, tetapi juga merupakan simbolisme politik Islam di Indonesia.

Selang 20 tahun kemudian, gagasan itu kembali muncul pada masa kekuasaan Presiden Abdurrahman Wahid yang akrab dipanggil dengan Gus Dur. Memang Gus Dur tidak secara eksplisit menyatakan perlunya pendidikan nasional dalam satu atap, namun kebijakannya tentang perubahan nama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menjadi Kemendiknas dapat menjadi indikasi ke arah penyatuan ini. Kali ini, gagasan penyatuan pendidikan nasional ini disambut biasa-biasa saja, dalam arti tidak ada penolakan keras maupun penerimaan dengan penuh kegembiraan. Tiadanya penolakan ini bisa jadi karena umat Islam sudah berada dalam *center of power* sehingga pendidikan keagamaan di bawah Kemenag bukan merupakan satu-satunya ekspresi simbolik politik Islam.

Oleh karena itu, menurut penulis dalam rangka menyikapi dan menangani dualisme pendidikan di Indonesia, maka ada beberapa langkah yang ditawarkan yaitu:

1. Harus ada keberanian pemerintah dan DPR untuk merevisi Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN), terutama pasal yang mengatur tentang penyelenggara pendidikan di Indonesia. Mengingat adanya dampak-dampak negatif yang dimunculkan terhadap perkembangan pendidikan nasional.
2. Harus ada keinginan yang kuat dan *action* nyata dari pihak perguruan tinggi, baik PTUN maupun PTAI sebagai lembaga keilmuan dan pencetak "*agent of change*" dalam mengintegrasikan ilmu umum dan agama itu sendiri dan dilanjutkan dengan sosialisasi pemahaman berupa kajian-kajian kepada pemerintah dan masyarakat akan dampak-dampak yang ditimbulkan jika dualisme pendidikan di Indonesia ini terus dipertahankan.
3. Masyarakat harus mengubah cara pandang terhadap dualisme pendidikan. Bahwa pendidikan yang diselenggarakan oleh dua lembaga dalam sebuah negara

akan menyebabkan kebingungan dan tumpang tindih antar lembaga yang menaungi pendidikan di Indonesia.

Dengan demikian, wajah baru pendidikan Islam hendaknya berwujud pendidikan bermutu, di mana dualisme pendidikan di Indonesia harus diakhiri. Dualisme pendidikan hanya mengakibatkan persoalan-persoalan yang rumit. Islam tidak pernah mengotak-kotakkan ilmu, bahkan Islam memiliki konsep bahwa ilmu itu sumbernya satu, yaitu dari Allah swt., baik itu ilmu agama maupun ilmu umum.

SIMPULAN

Adalah penting untuk mempertimbangkan ide tentang islamisasi ilmu seperti yang ditawarkan al-Faruqi. Islamisasi ilmu dalam pendidikan Islam berarti para akademisi muslim harus menguasai semua disiplin ilmu modern, memahami disiplin tersebut dengan sempurna, dan merasakan itu sebagai perintah agama. Setelah itu mereka harus mengintegrasikan pengetahuan baru tersebut ke dalam keutuhan warisan Islam dengan melakukan eliminasi, perubahan, penafsiran kembali, dan penyesuaian terhadap komponen-komponennya sebagai *world view* Islam dan menetapkan nilai-nilainya.

Solusi lainnya, penulis menawarkan pendapat bahwa *reposisi* harus dapat dilakukan. Reposisi yang dimaksud adalah cara pandang untuk mengembalikan ilmu pada posisi yang sebenarnya. Dalam konteks pendidikan Islam, hendaklah dikembalikan nilai spirit pendidikan Islam dan jangan terjebak pada virus yang merusak nilai spirit tersebut. Tampilan permukaan bukanlah sesuatu yang menentukan keberhasilan spirit pendidikan Islam, tetapi upaya terhadap mengubah cara pandang untuk kemajuan mutlak harus dilakukan.

Ada beberapa tahap yang dapat ditawarkan agar reposisi bisa terealisasikan, yaitu perubahan orientasi pada nilai keagamaan yang sama, perubahan orientasi mencari status, dan perubahan orientasi cita-cita untuk masa depan. Perubahan orientasi pada nilai keagamaan yang sama maksudnya adalah cara pandang terhadap pendidikan Islam harus diukur atas dasar kesamaan atau kesetaraan antara institusi dengan muatan nilai yang ditawarkan. Misalnya lembaga pendidikan di bawah institusi kementerian agama dikatakan pendidikan yang ditawarkan sarat dengan pendidikan Islam sementara pendidikan umum di bawah pendidikan nasional bukan dikatakan pendidikan Islam. Pandangan seperti ini jelas harus dirubah. Pendidikan dikatakan sukses tidak bisa diukur berdasarkan banyaknya peserta didik yang mendatangi lembaga tersebut. Sehingga para penyelenggara dan pengelola pendidikan berbondong-bondong untuk mengejar status sekolah favorit.

Selanjutnya perubahan yang juga harus dilakukan adalah orientasi cita-cita masa depan. Orang Islam selalu berorientasi pada masa depan yang lebih baik. Namun, cara pandang ini agar tidak selalu dikaitkan dengan kehidupan ekonomi saja. Namun, lebih luas meliputi semua dimensi kehidupan sehingga tidak terjebak pada komersialisme pendidikan yang pada akhirnya mengarah kepada paham materialistik.

CATATAN AKHIR

1. Ali Riyadi, *Politik Pendidikan Menggugat Birokrasi Pendidikan Nasional*, Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2006, h. 82.
2. Sumarsono Mestoko, *Pendidikan Indonesia dari Jaman ke Jaman*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1979, h. 41.
3. Usman Abu Bakar dan Surohim, *Fungsi Ganda Lembaga Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Safira Insan Press, 2005, h. 91-91.
4. Marwan Saridjo, *Bunga Rampa Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: Amisisco, 1996, h. 22.
5. Nurhayati Djamas, *Dinamika Pendidikan Islam di Indonesia Pasca Kemerdekaan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009, h. 83.
6. *Ibid*, h. 184.
7. Maksum, *Madrasah Sejarah dan Perkembangannya*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999, h. 115.
8. Departemen Agama, *Sejarah Madrasah, Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2004, h. 142.
9. *Ibid*, h. 148.
10. Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam, Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, Cet. XIV; Jakarta: Bulan Bintang, 2003, h. 58.
11. Abd. Rahman Assegaf, *Pengantar dalam buku Pendidikan Islam Integratif*, Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, h. 7.
12. <http://udhiexz.wordpress.com/tag/dikotomi-di-indonesia>
13. Syed Muhammad-Al-Naquib Al-Attas, *Konsep Pendidikan dalam Islam Suatu Kerangka Pikir Pembinaan Filsafat Pendidikan Islam*, Bandung: Mizan, 1994, h. 41.
14. Muslih Usa, *Pendidikan Islam di Indonesia Antara Cita dan Fakta*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991, h. 104.
15. Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, Cet. VIII; Jakarta: Kalam Mulia, 2010, h. 31-32.
16. Muhammad Fahmi, *Konsep Pendidikan Isma'il Raji Al-Faruqi: Relevansinya bagi Modernisasi Pendidikan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Fakultas Filsafat UGM, 2006, h. 14.
17. *Ibid.*, h. 15.
18. Husni Rahim, *Madrasah dalam Politik Pendidikan di Indonesia*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2005, h. 18.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakar, Usman dan Surohim. *Fungsi Ganda Lembaga Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Safira Insan Press, 2005.
- Al-Attas, Syed Muhammad-Al-Naquib. *Konsep Pendidikan Dalam Islam Suatu Kerangka Pikir Pembinaan Filsafat Pendidikan Islam*. Bandung: Mizan, 1994.
- Assegaf, Abd. Rahman. *Pengantar dalam buku Pendidikan Islam Integratif*. Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Departemen Agama. *Sejarah Madrasah: Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2004.
- Djamas, Nurhayati. *Dinamika Pendidikan Islam di Indonesia Pasca Kemerdekaan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.
- Fahmi, Muhammad. *Konsep Pendidikan Isma'il Raji Al-Faruqi: Relevansinya bagi Modernisasi Pendidikan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Fakultas Filsafat UGM, 2006.
- <http://udhiexz.wordpress.com/tag/dikotomi-di-indonesia/>
- Maksum. *Madrasah Sejarah dan Perkembangannya*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

-
- Mestoko, Sumarsono. *Pendidikan Indonesia dari Jaman ke Jaman*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1979.
- Nasution, Harun. *Pembaharuan dalam Islam, Sejarah Pemikiran dan Gerakan*. Cet. XIV; Jakarta: Bulan Bintang, 2003.
- Rahim, Husni. *Madrasah dalam Politik Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2005.
- Ramayulis. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kalam Mulia, 2010.
- Riyadi, Ali. *Politik Pendidikan Menggugat Birokrasi Pendidikan Nasional*. Jogjakarta: Ar-Ruzz, 2006.
- Saridjo, Marwan. *Bunga Rampa Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: Amisco, 1996.
- Usa, Muslih. *Pendidikan Islam di Indonesia antara Cita dan Fakta*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991.
- UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.